

ABSTRAK

Jauhar Lathifah. 2021. *Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan Jenjang Menengah Atas di Kecamatan Banjarmasin Timur*. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: (I) Dr. H. Ahmad Salabi, M.Pd, (II) Nauriatul Muharramah, S.E.I., M.Pd.I

Kata kunci: *Kebijakan, Sistem Zonasi, Pemerataan Pendidikan*

Kebijakan sistem zonasi adalah kebijakan yang mengatur tentang sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan jarak terdekat antara tempat tinggal peserta didik dengan lembaga pendidikan yang sudah ditentukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di kecamatan Banjarmasin Timur, bagaimana pola pemerataan pendidikan jenjang menengah atas di kecamatan Banjarmasin Timur serta apa saja dampaknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dan pola pemerataan pendidikan jenjang menengah atas serta dampak yang muncul dari kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan jenjang menengah atas di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan jenjang menengah atas di Kecamatan Banjarmasin Timur dan subjeknya adalah Kepala Sekolah, wakasek, guru, dan operator pada sekolah menengah atas negeri di kecamatan Banjarmasin Timur serta siswa yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyusunan data menggunakan editing dan kategorisasi. Kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif dan induktif.

Hasil penelitian ini dapat simpulan bahwa (1) Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di kecamatan Banjarmasin Timur terlaksana dengan baik, tertib, tidak terjadi kerumunan di kedua sekolah, berhubungan dengan kondisi pandemi covid-19, akses pendaftaran pelaksanaan kebijakan sistem zonasi hanya melalui sistem online, jadi para pendaftar hanya mengirim berkas lewat situs yang sudah disediakan pemerintah. Reaksi masyarakat juga sudah tidak terlalu nampak secara terbuka, dikarenakan kritik masyarakat yang pernah ada sebelumnya sudah ditanggapi oleh pemerintah yakni dengan mengurangi kouta zonasi menjadi 50%, dan menambah kouta jalur prestasi menjadi 30%. (2) Pola pemerataan akses pendidikan jenjang menengah atas di kecamatan Banjarmasin Timur dengan sistem zonasi ada dua pola aturan, yaitu tahap klasifikasi wilayah dan tahap seleksi. Akses layanan pendidikan sekolah yang diselenggarakan pemerintah ini terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat calon peserta didik tanpa di pungut biaya ataupun syarat lainnya. (3) Dampak yang muncul dari kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan jenjang menengah atas di Kecamatan Banjarmasin Timur dapat di lihat dari dua aspek. a. Berdasarkan aspek sosial budaya yaitu kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan jenjang menengah atas akan berdampak pada jalinan hubungan atau interaksi peserta didik

disekolah yang terbatas hanya dengan lingkungan wilayahnya saja sesuai wilayah zonasi yang sudah ditentukan dan pada tingkat prestasi sekolah, baik penurunan ataupun peningkatan secara akademik dan nonakademik. b. Berdasarkan aspek psikologis yaitu dari tenaga pengajar dan dari peserta didik. 1) Dari tenaga pengajar, kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan jenjang menengah atas berdampak pada proses pembelajaran siswa yang membuat tenaga pengajar harus mengubah sistem pembelajaran serta beradaptasi kembali dengan keadaan siswa-siswa yang mereka ajar sekarang. 2) Dari peserta didik, kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan jenjang menengah atas telah menimbulkan rasa kekhawatiran khususnya bagi calon peserta didik yang berada dalam zona wilayah yang sama namun memiliki jarak yang jauh dari sekolah, selain itu juga menimbulkan rasa aman (pasti diterima) bagi peserta didik yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah.

ABSTRACT

Jauhar Lathifah. 2021. *Zoning System Policy in Equitable Senior High Education in East Banjarmasin District*. Islamic Education Management Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. Advisor : (I) Dr. H. Ahmad Salabi, M.Pd, (II) Nauriatul Muharramah, SEI, M.Pd.I
Keywords: *Policy, Zoning System, Equitable Education*

The zoning system policy is a policy that regulates the new student admission system (PPDB) based on the closest distance between the student's residence and the predetermined educational institution. The problem in this research is how the zoning system policy is implemented in East Banjarmasin sub-district, how is the equitable pattern of senior secondary education in the East Banjarmasin district and what are the impacts. The purpose of this study was to determine the implementation of the equitable pattern of education at the upper secondary level and the impact that arises from the zoning system policy in the distribution of education for the upper secondary level in the district of East Banjarmasin.

This type of research is field research using qualitative methods. The object in this study is the zoning system policy in the distribution of senior secondary education in East Banjarmasin district and the subjects are the principal, vice principal, teachers, and administration at the state senior high school in East Banjarmasin district as well as students who are involved in the implementation of the zoning system policy. Data collection techniques in this research are interview, observation, and documentation methods. Arrangement of data using editing and categorization. Then analyzed using descriptive and inductive analysis.

The results of this study can be concluded that (1) The implementation of the zoning system policy in East Banjarmasin district was carried out well, orderly, there were no crowds in both schools, due to the conditions of the Covid-19 pandemic, access to registration for the implementation of the zoning system policy was only through the online system, so registrants only send files via the website which has been provided by the government. The public's reaction has also been less openly visible, because the government has responded to previous criticism by reducing the zoning quota to 50%, and increasing the achievement path quota to 30%. (2) The pattern of equal access to senior secondary education in East Banjarmasin district with the zoning system has two patterns of rules, namely the area classification stage and selection stage. Access to school education services organized by the government is open to anyone who meets the requirements of prospective students without being charged a fee or other requirements. (3) The impact that arises from the zoning system policy in equitable distribution of senior secondary education in East Banjarmasin district can be seen from two aspects. a. Based on the socio-cultural aspect, namely the zoning system policy in the equitable distribution of senior high school education will have an impact on the relationship or interaction of students at school which is limited only to the regional environment according to the zoning area that has

been determined and at the level of school achievement, both academic decline or increase non-academic. b. Based on psychological aspect, namely from the teaching staff and from students. 1) From the teaching staff, the zoning system policy in equitable distribution of senior secondary education has an impact on the student learning process which makes the teaching staff have to change the learning system and adapt again to the conditions of the students they teach now. 2) from students, the zoning system policy in the equitable distribution of senior secondary education has caused a sense of concern, especially for prospective students who are in the same area zone but have a long distance from the school. In addition, it also creates a sense of security (definitely accepted) for students who live close to the school.